

BAB III

FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN SRI SULTAN

HAMENGKUBUWONO X YOGYAKARTA SEBAGAI CALON

PRESIDEN 2009

Tentu banyak alasan Sultan untuk maju menjadi capres. Alasan yang paling nyata adalah keterwakilan puak Jawa dalam jati diri Sultan. Sebagai titisan darah Mataram, Sultan adalah salah satu pewaris sah dinasti Jawa, yang merupakan populasi terbesar bangsa ini. Sensus Badan Pusat Statistik 2005 menyebutkan populasi suku Jawa mencapai 40 persen lebih yang tersebar di hampir seluruh wilayah kepulauan Nusantara. Siapa pun kandidat presiden yang berhasil menarik preferensi politik masyarakat Jawa, diyakini akan memenangkan pertarungan. Namun, masyarakat Jawa tidak homogen dalam politik. Meski Jawa menjadi kancah pertarungan terbesar para kandidat presiden, orang Jawa tidak dapat diwakili oleh satu atau dua orang calon.

Apalagi, dalam realitasnya, hampir semua pasangan capres dan cawapres berasal dari Jawa: SBY, Mega, Wiranto, dan Prabowo. Makanya, tidak mudah bagi Sultan menjadi satu-satunya representasi politik masyarakat Jawa. Alasan kedua adalah ketokohan Sultan melampaui cakupan regional wilayah kekuasaannya. Sepak terjang Sultan sebagai tokoh nasional mulai terdengar sejak dirinya menggerakkan reformasi pada 1998, bersama beberapa kolega. Pada masa itu, Sultan mengajak seluruh warganya di Yogyakarta untuk ikut mendorong

Sultan menjadi juga bicara reformasi. Kira-kira politiknya di tingkat

bernama Paradhya yang hanya akan menjadi simbol tradisional, bukan lagi entitas kekuasaan formal. Trah Hamengkubuwono seperti akan mengakhiri kekuasaan formalnya di Yogyakarta pada diri Sultan HB X. Dengan akan berakhirnya periode kekuasaan tradisionalnya, maka momen pemilu 2009 adalah momen terakhir buat dirinya untuk unjuk diri dalam panggung politik nasional. Apalagi, usia Sultan yang sudah di atas 60 tahun tidak akan memungkinkannya lagi hadir di panggung politik pada pemilu periode berikutnya.

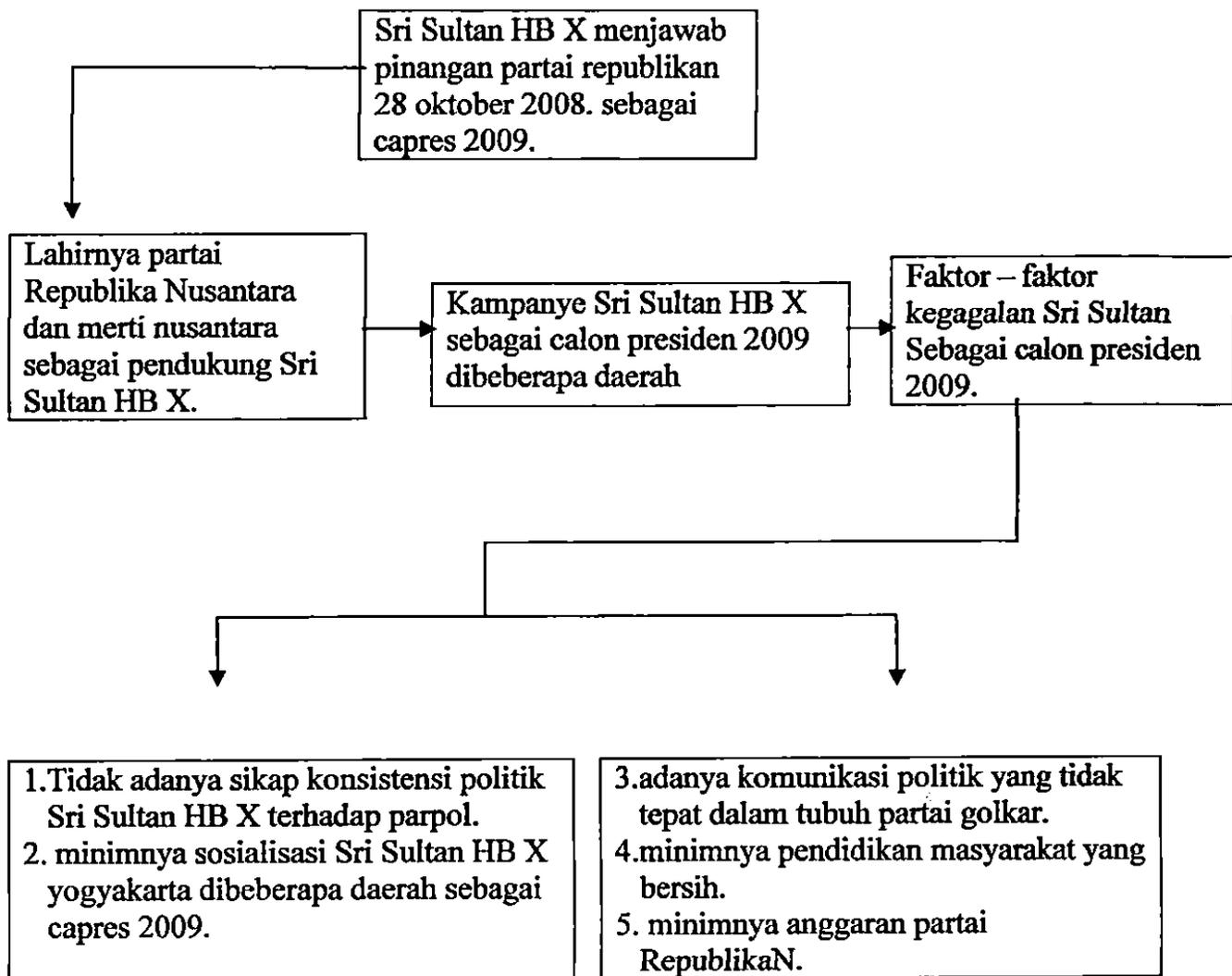
Sri Sultan Hamengku Buwono X yang lahir di Yogyakarta pada 2 April 1946 dengan nama kecil Bendoro Raden Mas (BRM) Herjuni Darpito. Setelah melewati tahap sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom, dia dinobatkan sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang diterimanya sebagai sebuah amanah dan pengabdian. Karir Sultan di bidang organisasi juga beragam. Selain aktif di Golkar dengan jabatan Ketua DPD Golkar DI Yogyakarta (1982-1997) dan sekarang menduduki posisi Dewan Penasehat (2004-2009), beliau juga pernah mengemban jabatan Ketua Umum Kadinda DIY (1982-1997) dan Ketua KONI DIY (1990-1998). Sehubungan dengan majunya Sri Sultan HB X sebagai calon presiden 2009, lahirlah sejumlah dukungan untuk Sri Sultan HB X di beberapa bagian dari elemen – elemen masyarakat Di Daerah Istimewa Yogyakarta maupun dari luar daerah Yogyakarta. Akan tetapi dengan lahirnya beberapa pendukung Sri Sultan HB X Yogyakarta tidak memberikan pengaruh yang signifikan untuk maju ke babak selanjutnya sebagai calon presiden 2009. dukungan tersebut berhenti ditengah jalan karna suara yang diperoleh untuk mendukung Sri Sultan HB X

akibat kegagalan Sri Sultan Hamengkubuwono X Yogyakarta sebagai calon Presiden 2009.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan selama ini di beberapa partai politik dan organisasi di nusantara Di Daerah Istimewa Yogyakarta tentang analisis kegagalan Sri Sultan Hamengkubuwono X Yogyakarta sebagai calon presiden 2009. Penulis menganalisis bahwa ada beberapa faktor akibat terjadinya kegagalan Sri Sultan Hamengkubuwono X Yogyakarta sebagai calon presiden. Akibat kegagalan tersebut penulis membagi menjadi dua bagian yaitu secara intern maupun secara eksternal. Secara internnya adalah bahwa strategi politik yang digunakan kurang tepat dan eksternalnya adalah minimnya pendidikan masyarakat yang bersih dan minimnya anggaran partai Republik Nusantara. Yang pertama strategi politik yang kurang tepat dimaksudkan oleh penulis adalah Tidak adanya konsistensi politik Sri Sultan Hamengkubuwono X Yogyakarta sebagai calon presiden 2009, Minimnya sosialisasi di beberapa daerah dan adanya Komunikasi yang kurang tepat tubuh partai politik. Adapun alur pencalonan Sri

... .. X 2009

Gambar 1.4. Bagan. Alur pencalonan Sri Sultan sebagai capres 2009



a. Tidak Adanya Konsistensi Politik Sri Sultan Hamengkubuwono X Yogyakarta Terhadap Partai Politik

Buat apa sebuah tahta dan menjadi Raja apabila tidak memberi manfaat bagi masyarakat" (Sri Sultan Hamengku Buwono IX, 7 Maret 1969). Tidak banyak yang tahu kalau keputusan Sultan Hamengku Buwono X bakal maju menjadi calon presiden (capres) pada pilpres 2009 bukan semata-mata atas keinginan

pisowanan ageng pada 28 Oktober 2008, bertepatan Hari Sumpah Pemuda, Sultan dengan lantang menegaskan, "Dengan memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dengan niat yang tulus memenuhi panggilan pada Ibu Pertiwi, dengan ini saya menyatakan siap maju menjadi calon presiden 2009." Sejak itu, dan hingga hari ini, peta politik Tanah Air berubah drastis dan kian hari kian memanas. Bagaimana tidak, sebagian kalangan sebelumnya tidak begitu memperhitungkan Sri Sultan HB X bakal berani dan "nekat" maju menjadi capres, sebab ia sendiri sedang mengurus rakyat Jogja di singgasana keratonnya. Sebagian lain berpendapat, wacana Sri Sultan HB X akan maju ke bursa pencalonan presiden sesungguhnya sudah tercium pada saat dirinya menyatakan tidak lagi bersedia menjadi gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) pada 2007. Dari sana, muncullah spekulasi di balik sikap Sri Sultan HB X dalam memperlakukan kekuasaan dan berpolitik.

Pertama, dengan tidak menolak menjadi gubernur pada periode berikutnya, selain karena alasan telah menjabat dua kali periode, Sultan seolah hendak memberikan pelajaran demokrasi kepada rakyat Jogja dan masyarakat luas pada umumnya. Padahal, oleh pemerintah pusat, Jogja dilabeli "daerah istimewa" yang tidak mempersoalkan manakala masyarakat setempat menghendaki Sultan sebagai raja sekaligus gubernur. Kedua, ada anggapan bahwa majunya Sultan ke bursa capres merupakan kritik praksisnya terhadap pemerintahan pascareformasi, yang tak juga berhasil menyejahterakan rakyat. Realitas kemiskinan, pengangguran, konflik antarindividu maupun kelompok, dan lain-lain, mengetuk

Indonesia. Pemerintahan saat ini, menurut penilaian Sultan, gagal menjalankan amanah rakyat sehingga berada di titik nadir kemelaratan. Ketiga, deklarasi Sultan yang menyatakan siap berlaga dalam kompetisi capres 2009 adalah bentuk penyaluran hak politiknya sebagai warga negara, walau risiko yang ditanggung amatlah besar. Sultan rela meninggalkan tahta kerajaannya demi apa yang ia yakini kepentingan rakyat. Bahkan, Sultan ikhlas mencopot gelar wong agungnya seperti seratus tahun lalu, jika memang harus luntur dengan sendirinya lantaran ia terjun ke dunia politik.

Keputusan itu bukan merupakan manuver politik, tetapi sesuai dengan panggilan hati dan jiwanya. Sultan tidak akan main-main dengan ucapannya, bahkan dalam mengurus negeri ini. Itulah yang dia ucapkan, "Sekali lagi saya ingin mengabdikan, bukan merecoki negeri. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi niat Sultan untuk maju sebagai capres. Ini adalah konsekuensi logis dari sabda pandhita ratu. Tidak heran Sultan terlihat "menghindar" ketika ada kabar bahwa dirinya akan dilamar menjadi cawapres mendampingi capres Megawati yang diusung PDI Perjuangan baru-baru ini. Sultan masih memegang teguh sabda pandhita ratu itu, sebagai capres bukan cawapres. Tapi entah di kemudian hari Sultan percaya bahwa dirinya saat ini sedang ditunggu-tunggu masyarakat luas, terutama masyarakat Jawa untuk memimpin bangsa ini. Sebab, dalam tradisi Jawa, untuk mewujudkan bangsa yang sejahtera, diyakini ada satria pinilih yang tampil. Dialah orang yang sebelum waktunya keluar masih disimpan atau dipingit. Orang Jawa selalu berharap hadirnya satria piningit untuk

Anggota Dewan Penasehat DPP Partai Golkar, Sri Sultan Hamengkubuwono X, mengklarifikasi wacana yang menyebutkan dirinya hanya mengizinkan Partai Republika Nusantara (RepublikaN) untuk menggunakan gambarnya sebagai alat peraga kampanye. "Ya silakan saja siapa yang punya kepentingan, wong gambar saya dibikin oleh Golkar ya boleh, kok," ujar Sultan usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II di gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/2/2009). Sultan menjawab pertanyaan Republika terkait isu dirinya hanya mengizinkan Partai RepublikaN untuk kepentingan kampanye partai tersebut. Sultan mengatakan, sejauh ini dirinya masih merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Partai Golkar. "Saya kan masih kader Golkar," imbuhnya seperti dikutip Republika Newsroom, Kamis (5/2/2009). Sebelumnya, Badan Pengendali dan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar kesal dengan kabar yang tersiar dari Yogyakarta perihal penggunaan gambar Sultan untuk kampanye. Ketua Harian Bappilu DPP Partai Golkar, Burhanuddin Napitulu, menilai, Sultan telah melakukan kesalahan jika hanya mengizinkan RepublikaN untuk menggunakan gambarnya. "Itu semakin membuat kita semakin mempertanyakan loyalitasnya kepada Golkar, kader-kader di daerah juga jadi marah," kata Burhanuddin. Tak hanya itu, Burhanuddin mengungkapkan, DPP Golkar secara diam-diam juga mempertanyakan alasan Sultan mau dicalonkan sebagai calon presiden RepublikaN. Namun Burhanuddin juga mengakui, langkah politik Sultan telah membuat Bappilu merasa tidak enak lantaran banyaknya tafsir politik yang mengemuka. Karena itu, Bappilu akan memasukkan tema langkah

nanti. "Kan harus ada ketegasan bagaimana partai menyikapi ini," imbuh Burhanuddin.

Yang pertama, dari yang dicalonkan sendiri dianggap kurang aktif untuk mempromosikan diri sebagai capres yang maju dari partai Republikan dan justru mempromosikan diri dari Golkar. Masyarakat di buat bingung atas perilaku Sri Sultan HB X yang mempunyai dua kendaraan politik. Karna pada waktu itu Sri Sultan Hamengkubuwono X Yogyakarta maju sebagai calon presiden dari partai republikan akan tetapi aktif juga di partai golongan karya. Dengan hal yang demikian masyarakat atau para pendukung Sri Sultan Hamengkubuwono X dibuat bingung. Sehingga masyarakat menilai bahwa partai republikan bohong untuk mencalonkan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Capres. Disamping itu juga pak Sri Sultan Hamengkubuwono X merasa kurang yakin bisa menang dari partai kecil. Yang pada akhirnya partai Republikan merapat ke pak Susilo Bambang Yudhoyono¹⁷.

Dengan hal yang demikian bahwa persoalan yang paling mendasarnya adalah dimana ketika Sri Sultan Hamengkubuwono X Yogyakarta maju sebagai calon presiden 2009 dari partai republikan terlihat jarang sekali untuk mempromosikan diri dari partai republikan, akan tetapi justru Sri Sultan HB X sendiri masih mempromosikan diri juga dari partai golongan karya ketika itu. Sehingga dengan perilaku yang seperti ini mengundang banyak tanya dan kebingungan pada masyarakat luas pada umumnya khususnya di Daerah istimewa Yogyakarta. Disamping itu juga ketua umum partai republikan Nusantara Di Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkapkan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono X Yogyakarta kurang aktif dan tidak percaya diri dalam mempromosikan diri dari partai republikan, yang dapat dikatakan sebagai partai kecil. Akibatnya banyak masyarakat tidak tahu bahwa Sri Sultan HB X maju sebagai calon presiden 2009 dari partai Republikan Nusantara pada waktu itu. Tidak adanya sikap konsistensi politik Sri Sultan Hamengkubuwono X

¹⁷ Hasil wawancara terhadap Bu Sukarti Selaku Ketua Partai Republikan Nusantara. Tentang

Yogyakarta yang dimaksudkan adalah bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono X Yogyakarta dalam pencalonannya sebagai calon presiden 2009 ini, memiliki dua kendaraan partai politik yang berbeda. Yang pertama Sri Sultan Hamengkubuwono X Yogyakarta adalah sebagai dewan penasehat partai golongan karya (Golkar). dan yang kedua kemudian Sri Sultan HB X Yogyakarta juga maju sebagai calon presiden yang dijagokan dari partai Repulika Nusantara. Hal inilah yang penulis anggap bahwa konsistensi politik Sri Sultan Hamengkubuwono X Yogyakarta tidak ada. Dan inilah yang menjadi faktor awal kegagalan Sri Sultan Hamengkubuwono X Yogyakarta maju sebagai calon presiden 2009.

b. Minimnya sosialisasi Sri Sultan HB X Yogyakarta di beberapa Daerah Sebagai Capres 2009

Ribuan massa kader dan simpatisan Partai RepublikaN menghadiri kampanye terbuka di lapangan bola Pangkalan Masyhur Medan, Minggu (5/4). Kampanye terbuka Partai RepublikaN yang berjalan tertib itu menghadirkan juru kampanye putri sulung Hamengkubowono X, Putri Lembayung Sri Bayu, Unsur Dewan Presidium Murphy Hutagalung, Sekjen Partai RepublikaN Yus Sudarso, Tirton Hutagalung (caleng No.1 DPR RI Sumut Dapil 2), Maju Tobing, Garin Nugroho dan Haposan Sialagan. Dalam orasi politiknya, para juru kampanye yang merupakan para caleg menekankan perlunya perubahan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, khususnya dalam perubahan kesejahteraan rakyat. Untuk

membawa rakyat ke arah perubahan yang lebih baik, yaitu dengan memilih Sri Sultan Hamengkubowono X sebagai Presiden.

Sementara itu, putri sulung Sri Sultan Hamengkubowono X di awal orasinya, menyampaikan mohon maaf karena Sultan Hamengkubowono X mempunyai kegiatan di Makassar, namun hati beliau tetap di RepublikaN. Dalam orasi singkatnya, Putri Lembayung Sri Bayu, mengingatkan kepada massa dan kader simpatisan agar jangan lupa mendukung dan memilih partai RepublikaN No 21 pada tanggal 9 April mendatang. Dengan memilih atau mencontreng caleg dan partai tersebut akan membawa Indonesia yang baru dan perubahan. Dalam orasi itu juga dikatakan bahwa Sri Sultan Hamengkubowono X dan RepublikaN ada dalam satu nafas. Partai RepublikaN tidak pernah membuat janji dan yang dibanggakan bahwa RepublikaN tidak pernah menjelek-jelekkkan pemimpin yang lain di tanah air ini, sementara pemimpin lain saling tuding menuding dan lupa bahwa rakyat masih banyak yang susah. Bukan Pemimpin yang seperti itu yang kita cari ke depan, untuk saling salah menyalahkan. Tetap perbaiki bangsa ini ke depan perlu diingatkan. Jika ingin perubahan kepada situasi kehidupan yang lebih baik maka tiada yang lain yang diusung adalah Sri Sultan Hamengkubowono X. Untuk mengusung Presiden, seluruh kader dan simpatisan dalam pemilu nanti agar mencontreng caleg dari partai RepublikaN.

Namun yang sangat disayangkan Siang ini Sri Sultan Hamengku Buwono X melakukan kampanye di Barito Kuala, Kalsel. Kampanye berlangsung di

Kampanye di Barito Kuala, Kota Barito Kuala, Kalimantan Tengah, pukul 14.00 waktu setempat, capres

yang diusung Partai Republikan ini akan tampil bersama Akbar Tandjung dan Syamsul Ma'arif. Sementara siang ini, halaman Keraton Yogyakarta yang merupakan rumah tinggal Sri Sultan Hamengku Buwono X dipergunakan untuk kampanye Partai Demokrat yang menghadirkan jurkamnas Susilo Bambang Yudhoyono. Saat disinggung mengapa selama ini Sultan tidak pernah kampanye di Pulau Jawa, Juru Bicara Merti Nusantara (relawan pendukung Sultan HB X menjadi Presiden RI) Willy Aditya mengatakan, Sultan memang tidak boleh kampanye di Pulau Jawa. Tidak adanya kesempatan Sultan HB X tidak tampil di Jawa ini memunculkan banyak dugaan yakni terkait bakal majunya Raja Yogyakarta itu sebagai calon presiden pada Pilpres Juni mendatang. "Ya kenyataannya memang enggak diberi kesempatan tampil di Jawa kok," kata Wasekjen Merti Nuantara, Bondan Nusantara, Sabtu.

c. Adanya Komunikasi Politik Yang Tidak Tepat Dalam Tubuh Partai Golkar

Keputusan rapat Pimpinan (Rapim) VII partai berlambang beringin itu dianulir dalam rapat pimpinan putaran berikutnya di Shangri-La, hotel mewah di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, yang berakhir Ahad lalu. Salah satu keputusan yang membuat para calon presiden itu dongkol adalah diubahnya jumlah calon presiden yang berhak ikut konvensi tingkat nasional. Semula ditetapkan hanya lima orang. Kemudian diubah menjadi tujuh. Jadwal memeras calon menjadi satu

perubahan itu, acara prakonvensi yang dilangsungkan Senin-Selasa lalu berganti. Prakonvensi ini diikuti pengurus Golkar tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Semua perubahan sudah jadi keputusan dan, nyatanya, diterima. "Meski kecewa, saya tetap yakin pada jalannya konvensi," kata Surya Paloh, bos *Metro TV* dan koran *Media Indonesia* ini. Tak bisa dimungkiri, perubahan banyaknya calon itu menguntungkan calon presiden yang hanya meraih dukungan sedikit, dan berada di luar lima besar. Mereka adalah mantan komandan pasukan elite Kopassus, Prabowo Subianto, dan termasuk Raja Kesultanan Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X. "Mereka punya kesempatan lagi untuk mencari tambahan pendukung," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit. Kabar yang beredar, perubahan ini memang ditujukan untuk "menyelamatkan" posisi Ngarso Dalem, panggilan kawula Yogyakarta pada Sri Sultan HB X. Perjalanan Sultan menuju arena konvensi nasional memang terseok-seok. Dua hari menjelang rapat pimpinan, sebagian besar provinsi sudah rampung menggelar konvensi daerah. Sultan baru mendapat dukungan di empat provinsi. Dengan ikut sertanya Sultan dalam konvensi dan kembali menjadi aktivis beringin, diharapkan suara Golkar meningkat, dan bisa mengimbangi partai lain.

Pengamat politik Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, AAGN Ari Dwipayana berpendapat, hasil Rapimnassus Partai Golkar yang mengamankan Jusuf Kalla (JK) sebagai calon presiden (capres) melemahkan peluang Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk maju menjadi capres dari partai yang kini dipimpin Wapres itu. "Keputusan Rapimnas secara eksplisit politik sudah jelas memberikan

Rapimnas juga mengamanatkan JK untuk melakukan negosiasi dan komunikasi politik untuk maju sebagai capres. "Dengan keputusan tersebut, maka posisi Sultan untuk maju bersama Golkar lemah," Ari Dwipayana saat dihubungi Jumat (24/4). Menurut Ari, untuk tetap dapat maju sebagai capres, Sultan sebaiknya lebih mengintensifkan komunikasi politik dengan berbagai partai. Hanya saja, katanya dia, saat ini proses komunikasi politik lebih efektif dilakukan antar institusi partai atau partai ke partai, bukan orang ke partai. "Kenyataan itu menjadi pilihan sulit bagi Sultan Karena tidak memiliki 'kendaraan' dari partai yang mengusung sebagai capres," paparnya.

Sejak memproklamkan diri maju sebagai Capres, popularitas Sri Sultan secara pelan tapi pasti mulai menyembul ke permukaan. Pemegang tahta Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat itu terus mengalami kenaikan popularitas. Berdasarkan berbagai survei, popularitas Sri Sultan kini berada di posisi ketiga di bawah SBY dan Megawati Soekarnoputri. Dalam hal ini satu hal yang perlu diingat, para raja memang memiliki basis massa tradisional. Tapi kita belum tahu, sejauh mana mereka memiliki kaki-kaki sampai ke bawah dalam bentuk mesin politik. Kemampuan komunikasi para raja kepada massa yang luas juga masih perlu dipertanyakan. *Wimar Witoelar* berpendapat, sekarang kemampuan komunikasi dan mesin politik adalah faktor utama dalam memenangkan pemilihan. "Ini zaman komunikasi politik. Jadi jangan underestimate komunikasi

dibayangkan kemampuan komunikasi berperan 60% sedangkan mesin politik berperan 40%¹⁸.

Hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap partai golongan karya (GOLKAR) kepada bapak Jon.s. Keban. Berikut adalah penjelasan tentang faktor kegagalan Sri Sultan HB X sebagai calon presiden 2009 menurut partai Golkar.yang membuat Sri Sultan Hamengkubuwono X gagal maju sebagai calon presiden adalah. Elemen yang mendorong Sri Sultan elemen masyarakat yang awam terhadap proses politik, Jadi mestinya para insiator ini sebelum melangkah lebih jauh itu sudah harus clear deal politik dengan kekuatan politik mana yang diyakini mempunyai power yang mempunyai dukungan masa yang kuat, yang memungkinkan Sultan itu memenangkan di pemilihan presiden. kalkulasi ini yang tidak dilakukan. inilah kegagalan teman - teman yang mencoba untuk mendorong sultan maju sebagai calon presiden. Langkah awal ini yang tidak pas karna komunitas yang menggiring dia ini sebelum melangkah tidak dulu melakukan komunikasi yang baik terhadap kekuatan politik lain¹⁹.

Kekuatan komunikasi politik Sri Sultan Hamengkubuwono X Yogyakarta masih sangat kurang didalam tubuh partai - partai politik lainnya khususnya partai besar yang berlambang beringin (golkar). Sehingga untuk mendapatkan dukungan untuk melangkah kebabak selanjutnya dalam mencalonkan diri sebagai calon presiden 2009 semakin kecil. akibatnya peluang yang dimiliki Sri Sultan HB X untuk maju sebagai calon presiden 2009 menjadi gagal.

d. Minimnya Pendidikan Masyarakat Yang Bersih

Hajat pesta demokrasi pemilu 2009 bukan ajang pendidikan politik cerdas bagi rakyat. Dalam konteks politik publik, pemilu 2009 hanya sekadar ajang transaksi dan kontrak nasional yang timpang dan tidak adil antara rakyat dan politisi. Rakyat menawarkan suaranya, sedangkan para politisi memberikan janji-

¹⁸ Oleh Mansyur Hayat. Komunikasi Dan Mesin Politik, Dua Faktor Kemenangan. Persepektif Online 13 Desember 2008.

¹⁹Pandangan Pak Jon.s. Keban dari Golongan Karya Tentang kegagalan Sri Sultan Hamengkubuwono X Yogyakarta Sebagai Calon Presiden 2009. 23 feb 2010.

janji abstrak. Aksi saling tipu diantara dua kubu yang bertransaksi tidak bisa dihindarkan, akibatnya rakyat yang memiliki hak suara menjadi pragmatis serta apatis. Demikian diungkapkan Direktur Urban Poor Consortium (UPC), Wardah Hafidz saat tampil sebagai narasumber diskusi "Pemenuhan Hak Politik Kelompok Rentan dalam Pemilu 2009" di Komnas HAM, Senin (6/4). Narasumber lain yang tampil dalam diskusi tersebut antara lain Heppy Sebayang (PPCI), Merlyn Sopjan (IWAMA), dan Lili Suwandi (Perhimpunan Jiwa Sehat). Lebih jauh Wardah mengungkapkan berdasarkan pantauan UPC di 15 kota di Indonesia selama masa kampanye berlangsung telah terjadi transaksi politik yang timpang antara politisi dan rakyat.

Untuk mendapat suara rakyat seringkali partai politik memberikan barang kepada rakyat seperti sembako, minyak, kaos dan sebagainya. Padahal dalam proses transaksi, imbuhnya, partai politik perlu menjabarkan kebijakan-kebijakan dan platform partai yang lebih rinci, bukan janji-janji yang abstrak. "Jadi pemilu legislatif 2009 bukan sarana pendidikan politik mencerdaskan bagi rakyat. Yang terjadi justru pembodohan," tegas Wardah. Menurut Wardah, dalam kondisi seperti ini, rakyat perlu menyikapinya secara serius terutama bagi kelompok rentan rakyat miskin kota dengan melakukan tawar-menawar yang seimbang dengan elit politik. Tawar-menawar politik itu dapat dilakukan melalui deklarasi publik sebagai kontrak politik. Dijelaskan Wardah, hal-hal mendasar yang perlu didesakkan bersama yakni, pertama, adanya jaminan hak atas pekerjaan dan

penggusuran. Sebab, penggusuran hanya mengakibatkan pemiskinan semakin parah. Ketiga, pelayanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.

Dan keempat, pelayanan kesehatan universal yang diperlakukan sama dan adil, sebab kelompok rentan miskin kota sering tidak diuntungkan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI), Heppy Sebayang mengungkapkan selama masa kampanye berlangsung tidak ada satupun partai politik yang menyinggung komitmen terhadap kelompok minoritas terutama hak-hak penyandang cacat. Padahal, menurut Heppy, jumlah suara kelompok minoritas di Indonesia sangat potensial karena jumlahnya mencapai 8 juta jiwa. "Mayoritas partai politik minim komitmen terhadap hak-hak para penyandang cacat," katanya.

Pandangan Merti Nusantara terhadap Faktor kegagalan Sri Sultan Hamengkubuwono X Yogyakarta maju sebagai capres karna situasi politik saat ini dianggap sangat pragmatis dalam artian harus punya uang, pendukung dan harus punya strategi marketing, jadi dengan demikian pemilihan yang dilakukan bukan lagi berdasarkan hati nurani tapi berdasarkan uang. dengan sistem politik yang seperti ini bahwa bagi mereka yang mempunyai uang banyak merekalah yang menang. Dan Sri Sultan Hamengkubuwono X tidak menginginkan hal yang seperti ini, dimana segala sesuatunya untuk memilih pemimpin pada rakyat dinegara ini harus memiliki uang²⁰.

Berkaitan dengan hal diatas bahwa dimana ketika masyarakat kelas bawah tidak lagi bisa memberikan kepercayaan yang penuh terhadap elit – elit politik di indonesia khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Akibatnya ditengah pesta demokrasi di Indonesia sebagian besar masyarakat menjualkan hak suaranya terhadap para elit politik yang mempunyai materi. Artinya bahwa pemilihan yang

²⁰ Hasil wawancara terhadap Pak Bondan selaku sekretaris Merah Putih Nusantara. Tentang
 Pemilihan Sri Sultan Hamengkubuwono X Yogyakarta Sebagai Calon Presiden 2009. 17 mar

dilakukan oleh sebagian besar masyarakat kita adalah pemilihan yang bukan lagi didasarkan dengan hati nurani melainkan materi. Demikian yang penulis maksudkan minimnya pendidikan politik masyarakat yang bersih. Dalam hal ini bahwa kehidupan masyarakat dalam ruang demokrasi, dewasa ini telah terjebak didalam politik praktis pada umumnya. Hal yang seperti inilah yang sangat sekali tidak diinginkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X Yogyakarta, seperti yang diungkapkan oleh Merti Nusantara sebagai organisasi pendukung.

e. Minimnya Anggaran Partai Republikan

Yogyakarta, Kompas - Partai Republikan Nusantara atau Republikan tak semata mendompleng popularitas Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, dengan mengusungnya sebagai calon presiden. Hubungan Republikan dengan Sultan adalah saling membantu. "RepublikaN dengan Sultan saling mengisi. Kami membantu sosialisasi pencapresan Sultan di 33 provinsi yang ada kepengurusan Republikan," ucap Sukarti Isbandiyah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Republikan DIY, Senin (23/3), di sela-sela kampanye di Lapangan Kebonagung, Imogiri. Sukarti mengakui, Republikan membutuhkan Sultan untuk menggaet dukungan publik dalam Pemilu 2009, terutama dari para pendukung Sultan. Dengan mencapreskan Sultan, pendukung Sri Sultan HB X Yogyakarta yang selama ini simpatisan sejumlah partai lain diharapkan memberi suaranya ke Republikan, partai yang pertama menyatakan diri mengusung Sultan sebagai capres. "Kami optimistis bisa menarik suara dari pendukung Sultan.

pendukungnya," ucapnya. Meski pada hari pertama kampanye terbuka tak mengerahkan massa besar-besaran, bukan berarti RepublikaN tidak punya massa pendukung. Pihaknya baru akan menggelar kampanye menghadirkan ribuan orang pada 3 April. RepublikaN sengaja tak kampanye besar-besaran hari ini karena tidak mau massanya digembosi.

Selain itu, juga sekaligus menghemat dana kampanye. Menyinggung kemungkinan kolaborasi dengan partai lain, itu juga baru dipikirkan usai pemilu legislatif. Ia yakin mencapai target minimal menempatkan dua orang di kursi DPR dan minimal empat orang di kursi DPRD kabupaten/kota/provinsi di DIY. Didera masalah di Kulon Progo dan Gunung Kidul, karena didera sejumlah masalah, DPD Partai RepublikaN setempat urung kampanye. Bendahara Dewan DPD RepublikaN Kulon Progo Eko Widiyantoro mengatakan pihaknya tak berkampanye karena tidak mempunyai satu pun caleg dari Kulon Progo. Praktis, jumlah kader dan massa partainya di Kulon Progo juga amat minim. Selain itu, parpol baru ini juga sama sekali tidak memiliki dana kampanye. "Dalam tubuh DPD RepublikaN Kulon Progo terjadi kesalahpahaman sehingga antarpengurus sudah tidak berkomunikasi beberapa waktu terakhir," ucap Eko. Ia tidak merasa sayang karena melewatkan dua kesempatan kampanye. Sejauh masalah internal DPD belum terselesaikan, maka sikap diam akan terus diambil pengurus.

Soal upaya menggalang massa, Eko tidak dapat berbuat banyak. Ia juga tidak mau berkomentar. Kantor Sekretariat DPD RepublikaN di Toyan, Wates,

f. Minimnya Dukungan Partai Rupublika Nusantara Pada Pemilihan Umum 2009

Partai Republika Nusantara (RepublikaN) meluncurkan lagu Mars Republikan yang merupakan simbol roh (semangat) perjuangan partai berlambang burung garuda terbang tersebut. Mars RepublikaN diluncurkan oleh Putri Sulung Sri Sultan HB X, GKR Pambayun, dalam Kampanye Terbuka dan Peluncuran Mars RepublikaN di Lapangan Pacuan Kuda Pulomas, Jakarta, Jumat. Pada kesempatan itu, sekitar 10.000 orang simpatisan partai yang mendapatkan rekor MURI untuk deklator terbanyak itu hadir dari seluruh Jabodetabek. Di dalamnya termasuk relawan dan calon legislatif se-DKI Jakarta. Sejumlah orator politik berkampanye mulai pukul 13.00 WIB di antaranya Ketua Presidium Partai RepublikaN, Syahrir M.S, Sekjen Partai RepublikaN, Yus Sudarso, Muslim Abdurahman, sementara juru kampanye tamu hadir sutradara muda, Garin Nugroho dan penyanyi/pencipta lagu, Franki Sahilatua. Sampai saat ini lagu Mars RepublikaN belum dinyanyikan dan tepat hari ini Putri Pambayun meluncurkannya," kata Sekretaris Jenderal Partai RepublikaN, Yus Sudarso.

Sementara Merti Nusantara, adalah organisasi yang diharapkan menjadi mesin sosialisasi Sri Sultan ke akar rumput. Merti Nusantara dibangun sebagai organisasi cair namun sewaktu-waktu bisa digerakkan. ' Sri Sultan HB X Menyapa' merupakan program rutin organisasi sebuah acara di mana Sri Sultan HB X mendatangi langsung masyarakat. Motif utama Merti bisa bergerak adalah

“Kami bantingan,” kata Untoro Hariadi. Dia gembira, karena sampai saat ini banyak sumbangan mengalir. Ada yang menyumbang kaos, dan juga lain-lain. “Keinginan kami adalah Sri Sultan HB X dibiayai oleh pendukung. Jadi nanti silakan, jika Sri Sultan HB X jadi presiden, bilang saya ikut memenangkan Sri Sultan sebagai presiden,” ujarnya. Memang, ongkos maju ke tahta RI-1 tak murah. Willy Aditya hanya memberi ancar-ancar, jika Sri Sultan HB X resmi menggaet partai yang mencalonkannya, pasti banyak pihak akan menyokong. “Tapi, jika Sri Sultan HB X hanya calon wakil presiden, mereka akan menarik dukungan,”

Pemilihan Umum Anggota DPR dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka yang perhitungannya didasarkan pada sejumlah daerah pemilihan, dengan peserta pemilu adalah partai politik²¹. Pemilihan umum ini adalah yang pertama kalinya dilakukan dengan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut pemilih memilih calon anggota DPR, bukan partai politik. Hasil perolehan suara Parpol Pemilu 2009 Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan dan menetapkan perolehan suara partai politik peserta Pemilu 2009 dengan jumlah total suara sah nasional mencapai 104.099.785. Berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional Pemilu 2009 yang ditetapkan KPU Pusat di Jakarta, Sabtu malam. peringkat pertama hingga ketiga berturut-turut diraih Partai Demokrat, Golkar, dan PDIP.

Sedangkan perolehan suara yang dimiliki oleh partai republik Nusantara adalah 630.780 dengan persentase 0,61²².

Pilihan partai politik yang relatif baru dan belum mempunyai dukungan masa yang riil. Karna partai ini merupakan partai yang belum mempunyai pengalaman dalam politik dengan demikian bahwa strategi penggalangan dukungan menjadi lebih kecil²³

Dengan demikian bahwa untuk mencalonkan Sri Sultan Hamengkubuwono X Yogyakarta sebagai calon presiden 2009 menjadi terhambat. Pasalnya dukungan yang dimiliki oleh partai republik nusantara tidak memenuhi harapan. Berdasarkan Undang – undang pilpres bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden²⁴. Karna dukungan yang dimiliki tidak mencapai yang diharapkan. Akibatnya Sri Sultan HB X gagal untuk maju kebabak selanjutnya sebagai calon Presiden 2009.

²² Hasil perolehan Suara Partai Politik Pemilihan Umum 2009. Republik Nusantra. Minggu 10 Mei 2009.

²³ Pandangan Pak Jon.s. Kaban dari Golongan Karya Tentang kegagalan Sri Sultan Hamengkubuwono X Yogyakarta Sebagai Calon Presiden 2009. 23 feb 2010.